



Katalog BPS : 4102004.12.17

# DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR 2011

Kerjasama dengan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Samosir



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMOSIR**

<https://samudrabuku.go.id>

# **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011**

**(Pendekatan Gini Ratio dan Ukuran Bank Dunia)**

# **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011**

Katalog BPS : 3206001.12.17  
No. Publikasi : 1217.12.27  
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm  
Jumlah halaman : xii + 114 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Gambar Sampul :

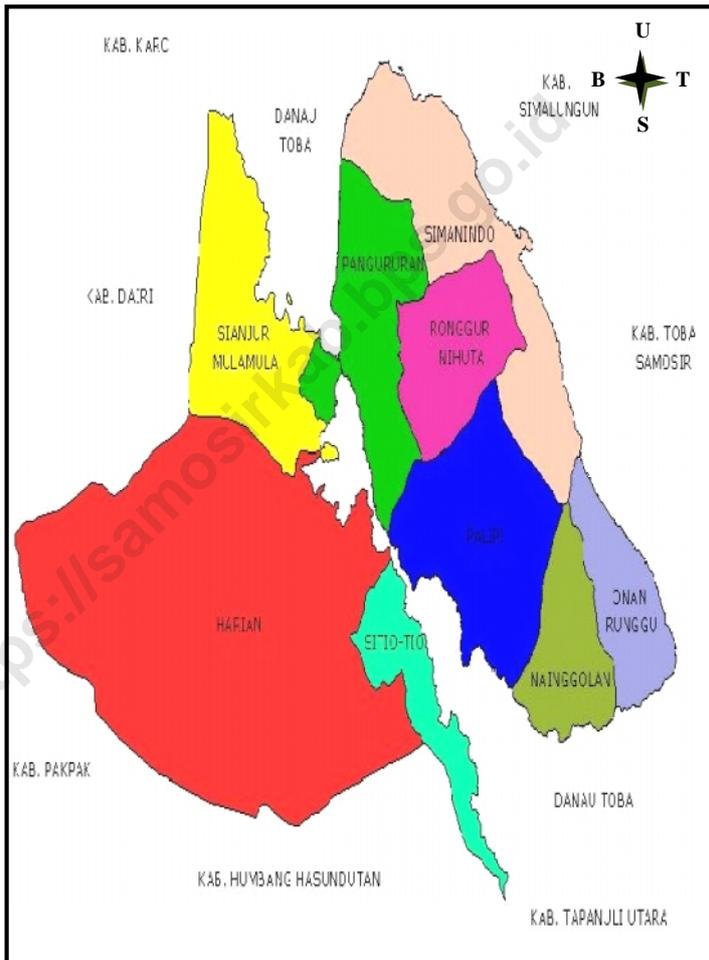
Seksi Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

# PETA WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR



## KATA PENGANTAR

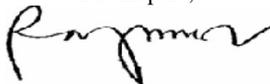
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samsir bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Samsir telah dapat menyelesaikan publikasi **“Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samsir Tahun 2011”**.

Publikasi ini memuat gambaran tentang distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samsir tahun 2011 serta perkembangannya sejak tahun 2007, yang dianalisis secara sederhana dengan menggunakan ukuran Gini Ratio dan ukuran Bank Dunia, untuk mengetahui dampak kebijaksanaan pembangunan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Samsir, yaitu apakah peningkatan pendapatan penduduk sebagai hasil pembangunan telah dinikmati oleh masyarakat secara relatif merata..

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan di masa mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan akan data statistik, baik untuk instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

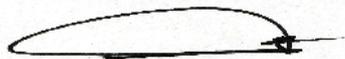
Pangururan, 2012

Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Samsir  
Plt. Kepala,



Hotraja Sitanggang, ST  
NIP 19741312 200003 1 001

Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Samsir  
Kepala,



Drs. Anggiat Tulus Sibagariang  
NIP 19680328 199402 1 001

**DAFTAR ISI**

PETA WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan .....	6
1.3 Sumber Data .....	7
1.4 Ruang Lingkup .....	8
1.5 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	13
2.1 Pertumbuhan Ekonomi VS Distribusi Pendapatan	13
2.2 Ukuran Distribusi Pendapatan .....	16
2.3 PDRB Per Kapita.....	25
2.4 Pengeluaran Per Kapita .....	26
2.5 Kemiskinan dan Pengukurannya .....	28
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 .....	37
3.1 Kondisi Umum Wilayah dan Administratif.....	37
3.1.1 Letak dan Geografis.....	37
3.1.2 Iklim dan Cuaca.....	38
3.1.3 Wilayah Administrasi.....	40

## DAFTAR ISI

---

3.2	Kondisi Umum Kependudukan .....	41
3.2.1	Jumlah Penduduk dan Penyebarannya.....	41
3.2.2	Struktur Umur Penduduk.....	45
3.2.3	Tingkat Pendidikan.....	48
3.2.4	Rasio Ketergantungan Umur.....	49
3.3	Kondisi Umum Ketenagakerjaan .....	51
3.3.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran.....	51
3.3.2	Lapangan Pekerjaan Utama.....	55
3.3.3	Status Pekerjaan Utama .....	57
3.4	Kondisi Umum Perekonomian Makro Daerah .....	59
3.4.1	Nilai PDRB.....	59
3.4.2	Struktur Perekonomian Makro.....	61
3.4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	63
3.5	Kondisi Umum Kesejahteraan Rakyat .....	66
3.5.1	PDRB Per Kapita.....	66
3.5.2	Pengeluaran Per Kapita dan Pola Konsumsi.....	68
3.5.3	Tingkat Kemiskinan.....	73
BAB IV	DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR.....	79
4.1.	Analisis Ukuran Gini Ratio .....	79
4.2.	Analisis Ukuran Bank Dunia.....	81
BAB V	PENUTUP.....	91
5.1.	Kesimpulan .....	91
	LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan.....	40
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2011.....	42
Tabel 3.3	Persentase Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011.....	44
Tabel 3.4.	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2011.....	46
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2011.....	48
Tabel 3.6.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011.....	50
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu Tahun 2011.....	52
Tabel 3.8	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011.....	56
Tabel 3.9	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2011.....	58

## DAFTAR ISI

---

..	
Tabel 3.10. Nilai PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2011.....	60
Tabel 3.11 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir Menurut Sektor.....	65
Tabel 3.12 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan Tahun 2007 – 2011.....	69
Tabel 3.13 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Golongan Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan.....	72
Tabel 3.14 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Samosir.....	73
Tabel 4.1 Gini Ratio Kabupaten Samosir Tahun 2007-2011.....	80
Tabel 4.2 Persentase Pendapatan yang Diterima oleh Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan Tahun 2007 – 2011.....	82
Tabel 4.3 Perkembangan Persentase Pendapatan yang Diterima oleh Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan.....	85
Tabel 4.4 Perkembangan Nisbah Pendapatan yang Diterima Antara Kelompok Miskin dan Kaya di Kabupaten Samosir.....	88

**DAFTAR GAMBAR**

Gambarl 2.1 Kurva Lorenz..... 18

Gambarl 2.2 Ilustrasi Memperkirakan Koefisien Gini..... 20

Gambarl 2.3 Ilustrasi Penentuan Penduduk Miskin Menggunakan Garis Kemiskinan..... 32

Gambarl 3.1. Rata-rata Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Samosir Menurut Bulan Tahun 2011..... 39

Gambarl 3.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kecamatan..... 41

Gambarl 3.3. Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2011..... 53

Gambarl 3.4 Peresentase Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011..... 55

Gambarl 3.5 Struktur Perekonomian Makro Kabupaten Samosir Tahun 2011..... 62

Gambarl 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2007 - 2011..... 63

Gambarl 3.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2007 - 2011..... 67

## DAFTAR ISI

---

Gambarl 3.8	Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2007 – 2011.....	68
Gambarl 3.9	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan Tahun 2007 – 2011.....	70
Gambarl 4.1	Persentase Pendapatan Yang Diterima Menurut Kelompok Penduduk Di Kabupaten Samosir Tahun 2011.....	86

# **BAB 1**

---

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era otonomi daerah sekarang ini, peranan data dan informasi statistik semakin penting dan strategis dalam proses pembangunan suatu daerah. Bagi pemerintah, data dan informasi statistik selain merupakan instrumen penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat melalui perencanaan pembangunan, juga merupakan instrumen penting dalam evaluasi capaian pembangunan yang lebih terukur. Bahkan akhir-akhir ini, data statistik juga telah menjadi alat untuk klarifikasi dan legitimasi bagi klaim keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembangunan baik nasional maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tuntutan akan ketersediaan data dan informasi statistik, baik oleh pemerintah daerah maupun kalangan pengguna data lainnya, dirasakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir sebagai

## PENDAHULUAN

---

perwakilan BPS di Kabupaten Samosir semakin meningkat dan beragam pula.

Sementara itu, BPS sebagai lembaga resmi pemerintah di bidang perstatistikan hingga saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan semua ragam data statistik, terutama menyangkut statistik spesifik lokal masing-masing daerah yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu diantara data dan informasi statistik yang dimaksud tersebut adalah indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk (Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia).

Statistik ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk (Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia) merupakan ukuran yang umum digunakan oleh berbagai negara maupun daerah hingga saat ini untuk mengevaluasi

keberhasilan pembangunan, selain ukuran pertumbuhan pendapatan penduduk ataupun ukuran-ukuran lainnya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini akan memberikan gambaran sampai sejauh mana peningkatan pendapatan penduduk dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas dan merata secara terukur, sehingga strategi dan kebijakan pembangunan dalam upaya peningkatan pendapatan yang semakin merata dan pemerataan pendapatan yang semakin meningkat dapat dipantau secara berkala.

Penyediaan statistik indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk (Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia) di daerah hingga saat ini lebih banyak diupayakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan BPS di daerah setempat, sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah..

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan statistik indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan (Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia) penduduk di Kabupaten Samosir, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Samosir bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

## PENDAHULUAN

---

Kabupaten Samosir melakukan upaya untuk menyediakan data dan informasi tersebut melalui kegiatan penyusunan publikasi Distribusi Pendapatan penduduk Kabupaten Samosir setiap tahun.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang :

- a) Tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 serta perkembangannya sejak tahun 2007 berdasarkan ukuran Gini Ratio.
- b) Proporsi pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 serta perkembangannya sejak tahun 2007, sesuai dengan pengelompokan penduduk berdasarkan pendapatan, dan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin (kriteria Bank Dunia).

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi statistik tentang tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 serta perkembangannya sejak tahun 2007, yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir terutama dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok pemerintahan, maupun oleh berbagai kalangan pengguna data yang lain.

### 1.3 Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penghitungan Indeks Gini dan Tingkat Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu :

- a) Persentase jumlah penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan pengeluaran, dan
- b) Persentase jumlah pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan pengeluaran per kapita per sebulan.

Di samping itu, untuk melengkapi pembahasan dalam publikasi ini digunakan juga beberapa data lain yang penting, seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, rata-rata dan persentase pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis konsumsi, jumlah penduduk, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta data lain yang berhubungan dengan analisis.

### 1.4 Ruang Lingkup

Karena keterbatasan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data PDRB yang belum tersedia hingga tingkat kecamatan, maka tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Samosir yang disajikan dalam publikasi ini terbatas hanya pada tingkat kabupaten tanpa perbandingan antar kecamatan maupun antar desa perkotaan dan pedesaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini dibagi dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

- a) **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan publikasi, maksud dan tujuan, sumber data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- b) **Bab II Uraian Teoritis**, memuat tentang uraian pertumbuhan ekonomi vs distribusi pendapatan, uraian tentang distribusi pendapatan, yaitu Kurva Lorenz, koefisien Gini, kriteria Bank Dunia, PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, serta uraian tentang kemiskinan dan pengukurannya.
- c) **Bab III Gambaran Umum Kabupaten Samosir**, memuat uraian tentang kondisi umum wilayah dan geografis, kondisi umum kependudukan, kondisi umum ketenagakerjaan,

kondisi umum perekonomian makro daerah, dan kondisi umum kesejahteraan rakyat..

- d) **Bab IV Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir**, memuat uraian tentang distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 serta perkembangannya sejak tahun 2007, yang dianalisis secara sederhana menggunakan ukuran Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia.
- e) **Bab V Penutup**, memuat kesimpulan tentang perhitungan dan analisis distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir.



## **BAB 2**

---

### **URAIAN TEORITIS**

## BAB II

# URAIAN TEORITIS

### 2.1. Pertumbuhan Ekonomi vs Distribusi Pendapatan

Tujuan akhir dari pembangunan di suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan regional atau nasional, karena secara teori ekonomi diketahui bahwa dengan adanya kenaikan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pajak dan tabungan secara berarti. Itulah sebabnya penekanan kenaikan pendapatan sebagai tujuan strategis pembangunan ekonomi di berbagai wilayah cukup beralasan.

Strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang tinggi memerlukan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum, namun strategi pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi kepada laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum adalah tidak cukup, karena berdasarkan penelitian para ahli di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta

## URAIAN TEORITIS

---

merta dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas melainkan hanya menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu dan menimbulkan kemiskinan absolut dan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakat. Dengan kata lain strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi yang maksimum tersebut justru menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk.

Berdasarkan hal tersebut strategi pembangunan yang lebih baik untuk tujuan pembangunan itu sendiri sebenarnya adalah strategi pembangunan yang tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, karena akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan untuk menghilangkan kemiskinan secara realistis. Pilihannya adalah dengan penekanan kepada tipe pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, sehingga manfaat pembangunan yang dinikmati oleh orang-orang yang kaya dapat didistribusikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi.

Dengan strategi pembangunan yang lebih baik ini maka tujuan pembangunan akan dapat menciptakan pola pertumbuhan pendapatan yang diinginkan dengan penekanan khusus pada akselerasi pertumbuhan pendapatan golongan miskin. Tentu saja hal ini memerlukan strategi yang berbeda dengan strategi yang

hanya berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum yang tidak mempertimbangkan akibatnya terhadap distribusi pendapatan penduduk.

Untuk hal tersebut maka ukuran keberhasilan pembangunan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum tidak semata-mata hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan penduduk namun harus dapat diukur apakah peningkatan pendapatan tersebut telah merata dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas atau tidak, sehingga apa yang disebut dengan upaya peningkatan pendapatan yang semakin merata dan pemerataan pendapatan yang semakin meningkat dapat diwujudkan.

Pertumbuhan pendapatan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari ukuran pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk, sementara pemerataan pendapatan penduduk dapat dilihat dari distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut.

## **2.2. Ukuran Distribusi Pendapatan**

Pada umumnya para ahli membedakan antara dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk tujuan kuantitatif dan analisis, yaitu Distribusi Pendapatan "Perorangan" atau Distribusi Ukuran dan Distribusi Pendapatan "Fungsional" atau Distribusi Pendapatan berdasarkan peranan masing-masing

faktor-faktor yang bisa didistribusikan (*distributive factor share*), namun Distribusi Pendapatan "Perorangan" atau Distribusi Ukuran adalah yang paling banyak digunakan. Distribusi Pendapatan "berdasarkan peranan masing-masing faktor-faktor yang bisa didistribusikan" (*distributive factor share*) tidak diuraikan dalam publikasi ini.

Distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Dalam konsep ini cara yang dilakukan oleh keluarga atau perorangan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, berapa besar masing-masing individu atau rumah tangga menerimanya, apakah pendapatan tersebut berasal dari bekerja atau dari sumber lainnya seperti, bunga, keuntungan, hadiah atau warisan, tidak dipersoalkan. Selanjutnya, tempat (kota atau desa) dan sektor sumber penerimaan tersebut apakah industri, perdagangan, jasa dan lain-lain juga diabaikan.

Beberapa teori maupun ukuran yang dikenal tentang Distribusi Pendapatan "Perorangan" atau Distribusi Ukuran adalah Kurva Lorenz, Koefisien Gini (Gini Rasio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil, Indeks-L, dan rasio Q5/Q1, Indeks Pareto, Teori Gibrat, Indeks Kuznets, dan Indeks Oshima, namun Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir dalam publikasi ini hanya menggunakan dua ukuran, yaitu

ukuran Gini Rasio yang didasarkan pada Kurva Lorenz, dan ukuran Bank Dunia, kedua ukuran ini merupakan yang paling umum digunakan oleh para ekonom untuk melihat distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah.

### 2.2.1. Kurva Lorenz

Ukuran ini digunakan untuk mengetahui rasio ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama waktu tertentu, misalnya satu tahun, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1.

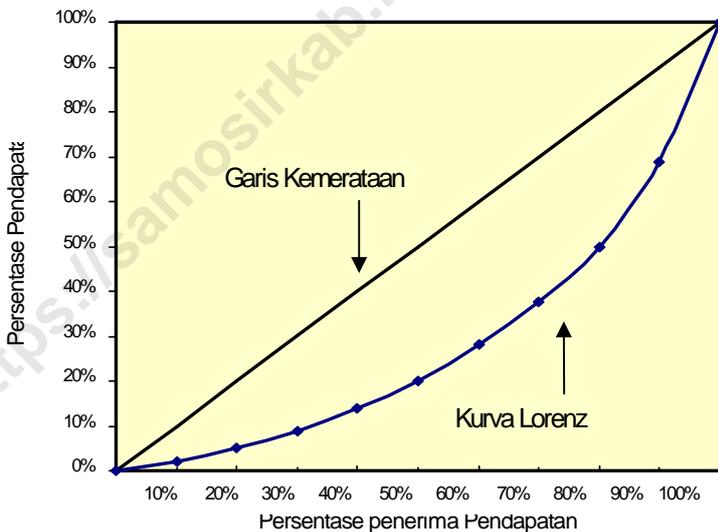
Dalam kurva Lorenz jumlah penerima pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada sumbu horizontal yang berakhir dengan 100 persen dan persentase dari pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut dinyatakan dalam sumbu vertikal yang juga berakhir dengan 100 persen, sehingga panjang kedua sumbu tersebut sama dan gambar keseluruhan merupakan segi empat.

Garis diagonal dari titik nol sudut kiri bawah ke sudut kanan atas merupakan tempat kedudukan persentase pendapatan yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Titik

## URAIAN TEORITIS

tengah garis diagonal menunjukkan 50 persen dari pendapatan didistribusikan persis untuk 50 persen dari jumlah penduduk, titik yang terletak pada  $\frac{3}{4}$  panjang diagonal menunjukkan 75 persen dari pendapatan didistribusikan pada 75 persen jumlah penduduk. Dengan kata lain garis diagonal merupakan garis "kemerataan sempurna" dalam ukuran distribusi pendapatan.

**Gambar 2.1 :**  
Kurva Lorenz



Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna) tingkat ketidakmerataan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat ketidakmerataan maka kurva

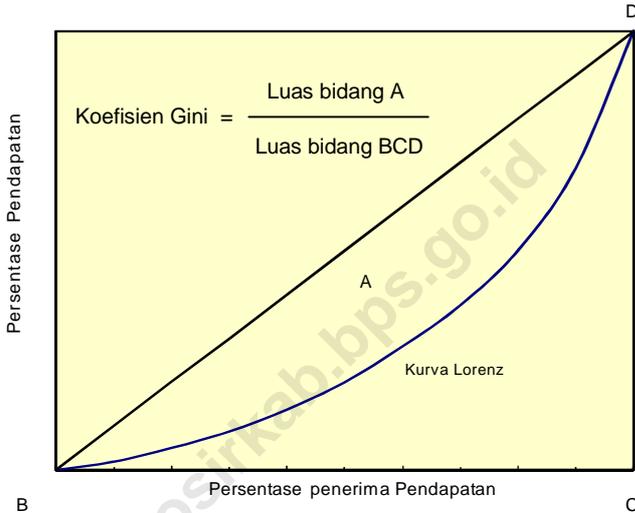
Lorenz akan semakin melengkung mendekati garis horizontal. Oleh karena tidak ada satu wilayah atau negara pun yang memperlihatkan pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan penduduknya, maka kurva Lorenz dari setiap wilayah atau negara akan berada di sebelah kanan garis diagonal.

### **2.2.2. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)**

Koefisien Gini atau Gini ratio adalah ukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif yang sangat sederhana, yang didasarkan pada kurva Lorenz. Secara grafik, pengukuran ketidakmerataan pendapatan diperoleh dengan cara menghitung rasio luas bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dengan luas separuh luas bidang di mana kurva terletak, seperti ditunjukkan pada gambar 2.2. Rasio ini dikenal sebagai "Rasio Konsentrasi Gini" (*Gini Concentration Ratio*) atau lebih sederhana disebut Koefisien Gini atau Gini Rasio, yang diambil dari nama seorang ahli statistik Italia, C. Gini yaitu orang yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

Gini Rasio merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya dapat bervariasi antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna).

**Gambar 2.2 :**  
 Ilustrasi Memperkirakan Koefisien Gini



$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Luas bidang A}}{\text{Luas bidang BCD}}$$

Secara matematis, Gini Rasio dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{GR} = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana :

GR = Koefisien Gini (Gini Rasio)

P<sub>i</sub> = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

$Q_i$  = Persentase kumulatif pendapatan rumah tangga sampai dengan kelas ke- $i$

$Q_{i-1}$  = Persentase kumulatif pendapatan rumah tangga sampai dengan kelas ke- $(i-1)$

$n$  = Banyaknya kelas pendapatan

Hera Susanti dkk, dalam buku Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI,1995, membuat kriteria Gini Rasio sebagai berikut :

- Jika Gini Rasio  $< 0.4$ , maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan rendah,
- Jika  $0.4$  Gini Rasio  $0.5$  maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan sedang (Moderat)
- Jika Gini Rasio  $> 0.5$  maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan tinggi.

Menurut Michael P. Todaro - Buhanuddin Abdullah, dalam buku Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,edisi ketiga jilid 1, Erlangga, 1993, Gini Ratio dari negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat tidak merata umumnya terletak diantara  $0,5$  dan  $0,7$ , sedangkan Gini Rasio dari negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata terletak diantara  $0,20$  dan  $0,35$ .

Namun demikian, Gini Ratio hanyalah suatu indikator yang mengukur tingkat pemerataan pendapatan secara umum, namun tidak bisa menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok bawah (miskin) dengan kelompok atas (kaya) yang justru sangat diperlukan dalam perencanaan maupun strategi pembangunan untuk mengatasi ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan itu sendiri, serta untuk mengatasai tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu para ahli menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain, sehingga lahirlah ukuran distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia.

### **2.1.3 Kriteria Bank Dunia**

Pada prinsipnya ukuran berdasarkan kriteria Bank Dunia dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yaitu :

- kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan Rendah (Miskin),
- kelompok 40 persen penduduk berpendapatan Menengah, dan
- kelompok 20 persen penduduk berpendapatan Tinggi (Terkaya).

Pengelompokan ini pada dasarnya sama dengan cara menggunakan desil (*decile*), dimana kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah sama dengan desil keempat, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah sama dengan desil kedelapan, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sama dengan desil kesepuluh.

Dalam menentukan besarnya desil digunakan rumus sebagai berikut :

$$D_i = Q_i + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)} (Q_a - Q_b) \dots\dots\dots (2.2)$$

dimana :

$D_i$  = Desil ke-i

$Q_i$  = Persentase dari pendapatan pada kelas  $D_i$

$P_i$  = Persentase dari penduduk pada kelas  $D_i$

$P_a$  = Persentase kumulatif dari jumlah penduduk sesudah kelas  $D_i$

$P_b$  = Persentase kumulatif dari jumlah penduduk sebelum kelas  $D_i$

$Q_a$  = Persentase kumulatif dari pendapatan sesudah kelas  $D_i$

$Q_b$  = Persentase kumulatif dari pendapatan sebelum kelas  $D_i$

## URAIAN TEORITIS

---

Rasio ketimpangan diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dengan total pendapatan yang diterima oleh seluruh penduduk. Kategori ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk ditentukan dengan kriteria, yaitu :

Jika :

- proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk **dikategorikan tinggi**,
- proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12 sampai dengan 17 persen, maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk **dikategorikan sedang/menengah**,
- proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih besar dari 17 persen, maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk **dikategorikan rendah**.

**2.3. PDRB Perkapita**

Hingga kini data pendapatan perkapita masing-masing daerah di Indonesia umumnya didekati melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang merupakan rata-rata besaran nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing penduduk suatu wilayah akibat adanya aktifitas produksi. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap merata), atau dengan rumus :

$$PDRB_{\text{perkapita}} = \frac{PDRB_{ADH \text{ berlaku}/ADH \text{ konstan}}}{Penduduk_{\text{Pertengahan tahun}}} \dots\dots\dots (2.3)$$

Oleh karena itu besarnya PDRB perkapita sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan ekonomi (PDRB) dan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Wilayah yang mempunyai nilai PDRB yang tinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat besar.

Pendapatan perkapita yang digambarkan oleh data PDRB perkapita suatu wilayah sesungguhnya bukanlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing setiap penduduk namun gambaran ini merupakan ukuran rata-rata yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perkapita secara regional dari

wilayah tersebut. Pada umumnya apabila data PDRB perkapita suatu wilayah disajikan secara berkala maka perubahan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut akan dapat diketahui. Meskipun ukuran ini tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara riil akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara regional.

### **2.4. Pengeluaran Perkapita**

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk adalah data pengeluaran rata-rata perkapita penduduk sebulan, penghitungannya didasarkan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan secara rutin oleh BPS setiap tahun.

Yang dimaksud dengan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan dari seluruh anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga, tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas hanya pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pada umumnya semakin tinggi pendapatan penduduk maka tingkat rata-rata pengeluaran penduduk pun akan semakin tinggi. Perubahan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah sebagai akibat meningkatnya pendapatan dapat diketahui dari perkembangan perubahan proporsi pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan dan non makanan dari daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan umumnya semakin turun karena peningkatan pendapatannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau bahkan ditabung.

Pada umumnya perhitungan dan analisis distribusi pendapatan penduduk di Indonesia adalah menggunakan data jumlah penduduk atau persentase penduduk dan jumlah pengeluaran penduduk per bulan atau persentase rata-rata pengeluaran penduduk per bulan terhadap total pengeluaran penduduk per bulan, menurut golongan pengeluaran baik pengeluaran untuk konsumsi makanan maupun pengeluaran untuk bukan makanan sebagai pendekatan (*proxy*) terhadap data pendapatan penduduk per bulan.

Oleh karena itu distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir yang disajikan dalam publikasi ini perhitungannya didasarkan pada data persentase penduduk dan persentase rata-rata pengeluaran penduduk per bulan terhadap total pengeluaran

penduduk Kabupaten Samosir per bulan menurut golongan pengeluaran.

### 2.5. Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain, terpenuhinya :

- Kebutuhan pangan
- Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

Menurut jenisnya kemiskinan dapat dilihat dari dua bentuk sebagaimana sering dilakukan dalam analisis kemiskinan suatu wilayah, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Analisis ukuran kemiskinan suatu wilayah berdasarkan kedua jenis ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan

ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk. Dalam kemiskinan relatif, fokus pengamatan pada dasarnya lebih ditekankan kepada ukuran sejauh mana kebijakan pembangunan suatu wilayah mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sehingga jurang antara si kaya dan si miskin semakin kecil.

Indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan relatif dalam suatu wilayah adalah tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan/pengeluaran dalam pendapatan/pengeluaran antar golongan penduduk dalam suatu wilayah melalui berbagai ukuran, seperti median/rata-rata pendapatan yang digunakan di Uni Eropah, Gini ratio, ukuran Bank Dunia, indeks Theil, dan lain-lain.

Namun ukuran kemiskinan relatif yang sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran antar golongan penduduk dalam suatu wilayah tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara/wilayah dan antar waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*basic needs*) seperti pangan, sandang, perumahan,

## URAIAN TEORITIS

---

pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum ini merupakan ukuran finansial yang dikonversikan dalam bentuk mata uang dan nilainya disebut sebagai batas garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan/pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan akan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Karena garis kemiskinan absolut adalah tetap (tidak berubah) dalam ukuran standar hidup yang dinilai secara finansial maka kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum antar wilayah dan antar waktu apabila menggunakan garis kemiskinan absolut yang sama.

Bank Dunia dalam menghitung kemiskinan absolut menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk yang dikonversi ke dalam US \$ PPP (*Purchasing Parity Power*) yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Misalnya untuk Indonesia angka konversi US \$ PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di mana jumlah barang dan jasa yang sama tersebut dapat dibeli seharga US \$ 1 di Amerika.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan ini juga digunakan oleh negara-negara lain seperti : Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh,

Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Melalui pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS, dari sisi ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dengan menggunakan indikator garis kemiskinan.

Oleh karena itu Garis kemiskinan (GK) yang dibuat oleh BPS terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

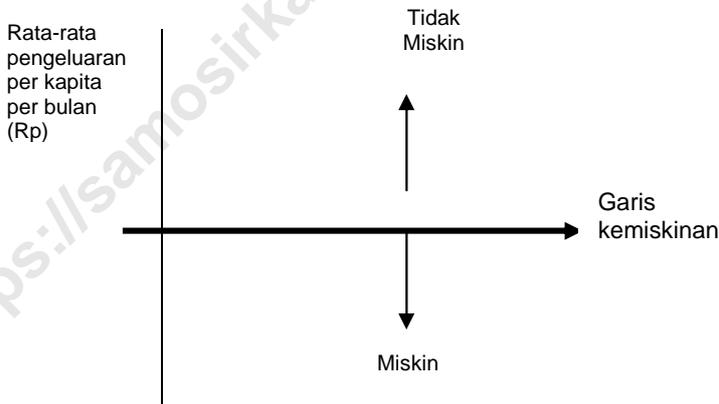
$$\mathbf{GK = GKM + GKNM} \dots\dots\dots (2.4)$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan suatu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, untuk indonesia nilai ini mengacu pada patokan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, yaitu 2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah suatu nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penduduk miskin di Indonesia menurut BPS adalah apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan (rupiah) penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun non makanan berada atau di bawah garis Kemiskinan (GK).

Perubahan jumlah penduduk miskin secara absolut selain dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang lain, juga dipengaruhi oleh sensitifitas terhadap perubahan tingkat harga-harga kebutuhan dasar sehari-hari yang akan mengakibatkan perubahan terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

**Gambar 2.3 :**  
Ilustrasi Penentuan Penduduk Miskin  
Menggunakan Garis Kemiskinan



Apabila harga-harga kebutuhan dasar di suatu daerah mengalami kenaikan yang signifikan tanpa diikuti oleh adanya tingkat kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dari kenaikan harga-harga tersebut maka garis kemiskinan daerah tersebut akan semakin meningkat dan jika garis kemiskinan meningkat maka

akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Itulah sebabnya dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan absolut, strategi utama yang akan dan sedang ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan pendapatan penduduk, dan menurunkan beban hidup penduduk.

Selain ukuran jumlah kemiskinan absolut, ada tiga indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagaimana dirumuskan oleh **Foster-Greer-Thorbecke** tahun 1984, yaitu :

- i) *Head Count Index* ( $P_0$ ), merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,
- ii) *Poverty gap Index* ( $P_1$ ), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks  $P_1$  semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan
- iii) *Poverty Severity Index* ( $P_2$ ), merupakan ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, indeks ini dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks  $P_2$  semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

## URAIAN TEORITIS

---

Rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing indeks tersebut adalah sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots (2.5)$$

dimana :

$\alpha = 0,1,2$

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$(i = 1,2,3,\dots,q), y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

## **BAB 3**

---

# **GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2011**

**3.1 Kondisi Umum Wilayah dan Administratif**

**3.1.1 Letak dan Geografis**

Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara  $2^{\circ}21'38''$  -  $2^{\circ}49'48''$  Lintang Utara dan di antara  $98^{\circ}24'00''$ - $99^{\circ}01'48''$  Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 1.444,25 km<sup>2</sup>, yaitu seluruh daratan Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba ditambah sebahagian daratan Pulau Sumatera. Kabupaten Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang terbentuk melalui Undang-Undang nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang,

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, serta di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir.

Topografi wilayah kabupaten ini pada umumnya berbukit-bukit dan bergelombang hingga pengunungan dengan ketinggian wilayah antara 904 - 2.157 m di atas permukaan laut, mengakibatkan 58 persen desa dari seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah ini letaknya berada di lereng pegunungan, 12 persen berada di lembah/daerah aliran sungai, dan hanya 30 persen yang berada di daerah dataran (Survei Potensi Desa 2011). Struktur tanahnya labil dan berada pada jalur gempa tektonik dan vulkanik.

### 3.1.2 Iklim dan Cuaca

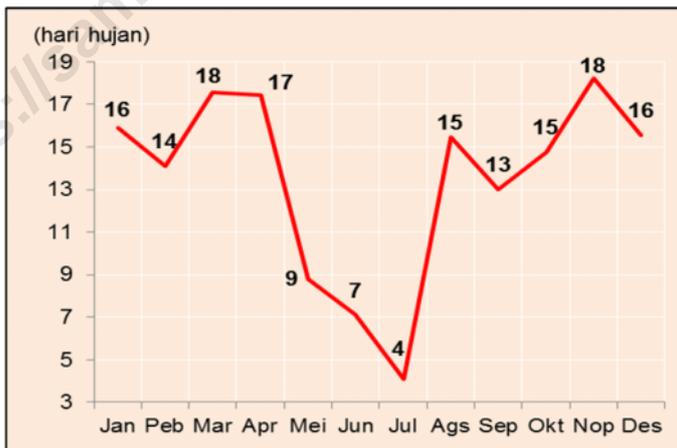
Kabupaten Samosir tergolong daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17 °C – 29 °C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 85,04 persen.

Rata-rata jumlah hari hujan per bulan yang tertinggi pada tahun 2011 terjadi pada bulan Maret dan Nopember, yaitu mencapai 18 hari hujan, sementara yang terendah terjadi pada bulan Juli, yaitu hanya 4 hari hujan.

Selama tahun 2011, curah hujan yang tertinggi tercatat 2.186 mm dan hari hujan sebanyak 162 hari, Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi terutama terdapat di wilayah Kecamatan Sianjur Mulamula, Harian dan Sitiotio, serta Kecamatan Simanindo dan Ronggur Nihuta, sementara wilayah dengan curah hujan terendah terdapat di wilayah Kecamatan Naingolan dan sekitarnya. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari sampai dengan April serta bulan bulan Agustus sampai dengan Desember.

**Gambar 3.1 :**

Rata-rata Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Samosir Menurut Bulan Tahun 2011



Sumber : BMKG, Stasiun Geofisika Parapat

### 3.1.3 Wilayah Administrasi

Pada tahun 2011 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan. Nama-nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan menurut masing-masing kecamatan adalah seperti tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 :**  
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

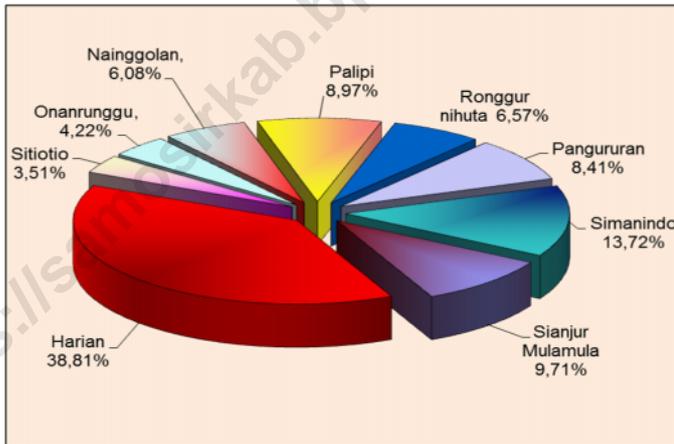
No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sianjur Mulamula	12	-	12
2.	Harian	13	-	13
3.	Sitiotio	8	-	8
4.	Onanrunggu	12	-	12
5.	Nainggolan	13	2	15
6.	Palipi	17	-	17
7.	Ronggurnihuta	8	-	8
8.	Pangururan	25	3	28
9.	Simanindo	20	1	21
Kabupaten Samosir		128	6	134

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

Adapun luas wilayah menurut masing-masing kecamatan adalah, Kecamatan Harian 560,45 km<sup>2</sup> (38,81 persen), Simanindo

198,20 km<sup>2</sup> (13,72 persen), Sianjur Mulamula 140,24 km<sup>2</sup> (9,71 persen), Palipi 129,55 km<sup>2</sup> (8,97 persen), Ronggurnihuta 94,87 km<sup>2</sup> (6,57 persen), Pangururan 121,43 km<sup>2</sup> (8,41 persen), Nainggolan 87,86 km<sup>2</sup> (6,08 persen), Onanrunggu 60,89 km<sup>2</sup> (4,22 persen), dan Siotio 50,76 km<sup>2</sup> (3,51 persen).

**Gambar 3.2 :**  
Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kecamatan



Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

### 3.2 Kondisi Umum Kependudukan

#### 3.2.1 Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 120.772 jiwa, terdiri dari laki-laki 60.104 jiwa dan

## KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

perempuan 60.668 jiwa, tinggal dalam rumah tangga sebanyak 29.365 rumah tangga. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2011 adalah 0,94 persen.

Secara umum penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 lebih banyak perempuan, hal ini ditunjukkan oleh angka rasio jenis kelamin, yaitu sebesar 99,07, yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

**Tabel 3.2 :**  
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan  
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Jumlah Rumah Tangga
		Laki- laki	Perem- puan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sianjur Mulamula	4 661	4 563	9 224	102,15	2 352
2.	Harian	3 923	4 010	7 933	97,83	1 903
3.	Sitiotio	3 594	3 597	7 191	99,92	1 776
4.	Onanrunggu	5 151	5 274	10 425	97,67	2 697
5.	Nainggolan	5 901	6 059	11 960	97,39	3 000
6.	Palipi	8 064	8 173	16 237	98,67	3 854
7.	Ronggurnihuta	4 178	4 256	8 434	98,17	1 988
8.	Pangururan	14 849	14 838	29 687	100,07	6 833
9.	Simanindo	9 783	9 898	19 681	98,84	4 962
	Kab.Samosir	60 104	60 668	120 772	99,07	29 365

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

Namun menurut kecamatan, Kecamatan Sianjur Mulamula dan Pangururan mempunyai jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, sementara tujuh kecamatan yang lain mempunyai jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dari pada penduduk perempuan, Hal ini ditunjukkan oleh angka rasio jenis kelamin di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Pangururan, yaitu masing-masing di atas 100 persen, sementara angka rasio jenis kelamin di tujuh kecamatan yang lain adalah kurang dari 100 persen..

Hingga tahun 2011 penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan di Kabupaten Samosir relatif belum merata, hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk menurut kecamatan, dimana sebanyak 40,88 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir hanya berada di dua kecamatan, yaitu Pangururan dan Simanindo, sedangkan 59,12 persen berada di tujuh kecamatan yang lain, yaitu Sianjur Mulamula, Harian, Siotio, Onanrunggu, Nainggolan, Palipi, dan Ronggur Nihuta.

Demikian juga dengan kepadatan penduduk, angka kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pangururan sebagai ibukota kabupaten, yaitu mencapai 244,48 jiwa/km<sup>2</sup>, dan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Harian, yaitu hanya 14,16 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.3 :**  
Persentase Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
Menurut Kecamatan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sianjur Mulamula	7,64	65,77
2.	Harian	6,57	14,16
3.	Sitiotio	5,95	141,67
4.	Onanrunggu	8,63	171,23
5.	Nainggolan	9,90	136,13
6.	Palipi	13,44	125,33
7.	Ronggurnihuta	6,98	88,9
8.	Pangururan	24,58	244,48
9.	Simanindo	16,30	99,29
	Kabupaten Samosir	100,00	83,62

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki

fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Pangururan sebagai ibu kota kabupaten.

### 3.2.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur dan jenis kelamin penduduk suatu wilayah merupakan karakteristik penduduk yang pokok, yang mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Samosir pada setiap kelompok umur (0-4) tahun hingga (35-49) tahun adalah lebih besar dari 100 persen, namun pada setiap kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun adalah kurang dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki pada setiap kelompok umur (0-4) tahun hingga (35-49) tahun lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dan pada setiap kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Fenomena semakin kecilnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun ini selain dipengaruhi oleh mortalitas antara penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dipengaruhi oleh migrasi ke

luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

**Tabel 3.4 :**  
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Samosir  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin (jiwa)		Laki-laki + Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	7 299	6 809	14 108	107,20
5 - 9	7 878	7 247	15 125	108,71
10 - 14	8 156	7 128	15 284	114,42
15 - 19	6 579	6 033	12 612	109,05
20 - 24	3 521	2 630	6 151	133,88
25 - 29	3 926	3 753	7 679	104,61
30 - 34	3 790	3 648	7 438	103,89
35 - 39	3 469	3 368	6 837	103,00
40 - 44	3 271	3 542	6 813	92,35
45 - 49	3 004	3 425	6 429	87,71
50 - 54	2 758	3 496	6 254	78,89
55 - 59	2 301	2 937	5 238	78,35
60 - 64	1 520	2 267	3 787	67,05
65 - 69	1 130	1 668	2 798	67,75
70 - 74	782	1 205	1 987	64,90
75 +	720	1 512	2 232	47,62
Jumlah	60 104	60 668	120 772	99,07

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

Berdasarkan struktur umur penduduk menurut kelompok dapat juga dihitung Umur Median (*Median Age*) penduduk. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama setelah semua angka umur penduduk tersebut diurutkan. Bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari Umur Median.

Dengan Umur Median dapat diketahui kategori umur penduduk dalam suatu wilayah, apakah termasuk kelompok penduduk umur muda (kurang dari 20 tahun), umur sedang (20 sampai 30 tahun), atau umur tua (di atas 30 tahun). Umur Median yang tua biasanya dimiliki oleh negara-negara atau wilayah yang sudah maju.

Berdasarkan perhitungan dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa Umur Median penduduk Kabupaten Samosir adalah 22,6 tahun, artinya separuh penduduk Kabupaten Samosir berada dalam kategori umur 0 sampai dengan 22,6 tahun, sedang separuh lainnya berada dalam umur yang lebih besar dari 22,6 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Samosir mempunyai kategori umur penduduk sedang (*intermediate*).

**3.2.3 Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011, persentase penduduk Kabupaten Samosir berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah adalah sebanyak 2,04 persen, yang masih sekolah 27,62 persen, dan yang tidak sekolah lagi 70,33 persen.

**Tabel 3.5 :**  
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas  
Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin  
Tahun 2011, (persen)

Partisipasi Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,69	3,46	2,04
2. Masih Sekolah	30,39	24,73	27,62
– SD	13,18	8,96	11,12
– SMTP	8,86	8,06	8,47
– SMTA	8,19	7,17	7,69
– Diploma/Sarjana	0,16	0,54	0,34
3. Tidak Sekolah Lagi	68,92	71,81	70,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2011

Diketahui juga bahwa menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum

sekolah dan yang tidak sekolah lagi adalah sebanyak 75,27 persen dari total penduduk perempuan, sementara penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah dan yang tidak sekolah lagi adalah sebanyak 69,61 persen dari total penduduk laki-laki. Disamping itu, persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah adalah 30,39 persen dari total penduduk laki-laki, lebih banyak dari pada penduduk perempuan, yaitu 24,73 persen dari total penduduk perempuan.

### 3.2.4 Rasio Ketergantungan Umur

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif ditinjau berdasarkan umur. Penduduk yang tidak produktif adalah gabungan dari penduduk yang berusia muda, yaitu penduduk yang berada pada kelompok umur (0–14) tahun dengan penduduk yang berusia lanjut, yaitu penduduk yang berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur (15-64) tahun. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara/daerah, apakah tergolong maju atau tidak. Pada umumnya suatu negara/daerah yang tergolong maju mempunyai angka

## KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Rasio Ketergantungan Umur yang lebih kecil dari pada negara/daerah yang belum maju.

Pada tahun 2011, angka Rasio Ketergantungan Umur (RKU) penduduk Kabupaten Samosir adalah 74,48 persen, artinya bahwa setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung secara ekonomi rata-rata 74,48 orang yang berusia belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi, yaitu penduduk yang berusia muda sebanyak 64,41 persen dan penduduk usia lanjut sebanyak 10,07 persen.

**Tabel 3.6 :**  
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2011, (persen)

KelompokUmur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	38,82	34,92	36,92
15 - 64	56,80	57,85	57,32
65 +	4,38	7,23	5,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2011

### 3.3 Kondisi Umum Ketenagakerjaan

#### 3.3.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Samosir berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja (*Economically active*) adalah sebanyak 57.442 orang, yaitu penduduk yang benar-benar bekerja sebanyak 56.141 orang dan pengangguran sebanyak 1.301 orang, sedangkan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja (*Uneconomically active*) adalah sebanyak 19.137 orang, yaitu terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 5.260 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 9.442 orang, dan lainnya, seperti penerima pendapatan dan lain-lain, adalah sebanyak 4.435 orang.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja adalah sebanyak 31.660 orang, lebih banyak dari pada jumlah angkatan kerja perempuan, yaitu hanya 25.782 orang. Sebaliknya, jumlah penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja, yaitu 13.916 orang lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yang tergolong bukan angkatan kerja, yaitu hanya 5.221 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2011, yaitu persentase jumlah

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi adalah sebesar 75,01 persen, angka ini juga diartikan sebagai banyaknya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dan siap bekerja di daerah ini untuk memproduksi barang dan jasa.

**Tabel 3.7 :**  
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas  
Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu  
Tahun 2011, (orang)

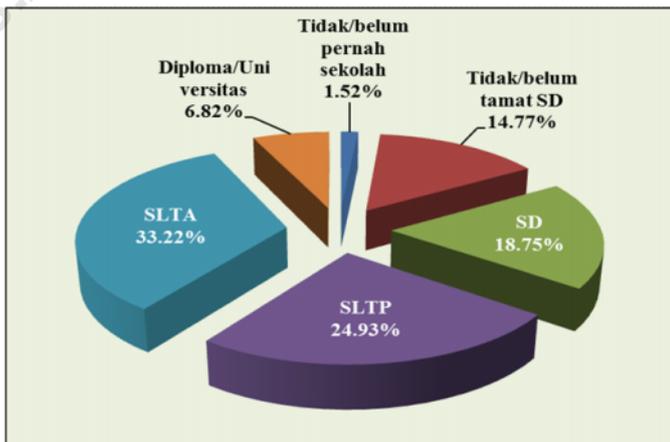
Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	31 660	25 782	57 442
– Bekerja	31 146	24 995	56 141
– Menganggiur	514	787	1 301
Bukan Angkatan Kerja	5 221	13 916	19 137
– Sekolah	2 601	2 659	5 260
– Mengurus rumah tangga	13	9 429	9 442
– Lainnya	2 607	1 828	4 435
Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja	36 881	39 698	76 579
TPAK (%)	85,84	64,94	75,01
TPT (%)	1,62	3,05	2,26

Sumber : Sakernas 2011

Semakin tinggi nilai TPAK maka keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja akan semakin besar pula, itulah sebabnya upaya perluasan dan pengembangan lapangan kerja merupakan salah satu titik berat pembangunan ketenagakerjaan.

Menurut latar pendidikan formalnya, kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Samosir tahun 2011 yang berpendidikan SLTA adalah 32,32 persen, diikuti oleh SLTP 24,93 persen, SD 18,75 persen, tidak/belum tamat SD 14,77 persen, tidak/belum pernah sekolah 1,52 persen, dan diploma/sarjana 6,82 persen.

**Gambar 3.3 :**  
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2011



Sumber : Sakernas 2011

Pada umumnya, semakin tinggi kualitas dan keterampilan dari angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja di suatu daerah, didukung oleh ketersediaan kesempatan kerja yang luas dan memadai, maka proses kemajuan perekonomian di daerah tersebut akan semakin baik, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut

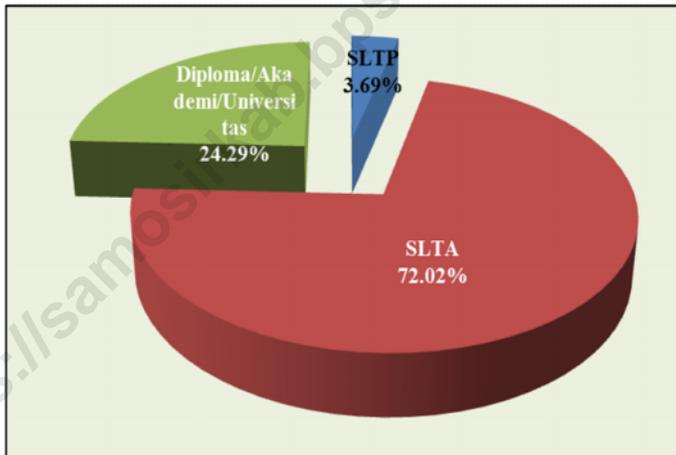
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah 2,26 persen. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan.

TPT di Kabupaten Samosir adalah tergolong rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, hal ini dipahami karena daerah ini adalah merupakan daerah pertanian, dan sebahagian besar penduduk tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda dengan yang bukan daerah pertanian, yaitu umumnya daerah perkotaan dimana lahan pertanian adalah terbatas, lapangan pekerjaan yang lebih banyak tersedia umumnya lebih mensyaratkan pada keterampilan dan pendidikan yang relatif lebih tinggi. .

Menurut tingkat pendidikan, dari 1.301 orang angkatan kerja yang tergolong pengangguran terbuka di Kabupaten

Samosir pada tahun 2011, sebanyak 72,02 persen (937 orang) diantaranya adalah berpendidikan SLTA, 24,29 persen (316 orang) berpendidikan diploma/akademi/universitas, dan 3,69 persen (48 orang) adalah berpendidikan SLTP.

**Gambar 3.4 :**  
Presentase Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2011



Sumber : Sakernas 2011

### 3.3.2 Lapangan Pekerjaan Utama

Salah satu ciri dari daerah pertanian dapat diketahui dari penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha utama di daerah tersebut, yang umumnya didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tahun 2011, lapangan usaha utama penduduk Kabupaten Samosir yang bekerja adalah lebih banyak di sektor pertanian, yaitu sebanyak 41.641 orang (74,17 persen), diikuti oleh sektor jasa-jasa (angkutan, perdagangan, keuangan, dan jasa) sebanyak 11.139 orang (19,84 persen), dan sektor manufaktur (industri, pertambangan/penggalian) sebanyak 3.361 orang (5,99 persen).

**Tabel 3.8 :**  
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	41 641	74,17
2. Manufaktur	3 361	5,99
3. Jasa-jasa	11 139	19,84
Jumlah	56 141	100,00

Sumber : Sakernas 2011

Besarnya dominasi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir disebabkan karena daerah ini merupakan potensi sektor pertanian, seperti pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

### 3.3.3 Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Samosir yang bekerja umumnya adalah sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga, yaitu sebanyak 23.860 orang (42,50 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebanyak 19.948 orang (35,53 persen), sedangkan pekerja yang lainnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 6.522 orang (11,62 persen), berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebanyak 3.781 orang (6,73 persen), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 937 orang (1,67 persen), dan pekerja bebas di pertanian dan non pertanian masing-masing sebanyak 504 orang (0,90 persen) dan 589 orang (1,05 persen).

Pada umumnya pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga, pengusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif tradisional, sedangkan sektor dan jenis pekerja yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan, dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

**Tabel 3.9 :**  
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja  
Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2011

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan	%
	Laki-laki	Perem- puan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	1 757	2 024	3 781	6,73
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	15 146	4 802	19 948	35,53
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	683	254	937	1,67
4. Buruh/karyawan /pegawai	4 229	2 293	6 522	11,62
5. Pekerja bebas di pertanian	400	104	504	0,90
6. Pekerja bebas di non pertanian	545	44	589	1,05
7. Pekerja tak dibayar	8 386	15 474	23 860	42,50
Jumlah	31 146	24 995	56 141	100,00

Sumber : Sakernas 2011

### 3.4 Kondisi Umum Perekonomian Makro Daerah

#### 3.4.1 Nilai PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran besarnya perekonomian makro suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu akibat adanya aktifitas ekonomi di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2011 mencapai Rp. 1.835.397 (juta), dan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 1.121.617 (juta). Menurut lapangan usaha atau sektor, nilai PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang paling tinggi adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 1.097,538 milyar, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar Rp. 452,536 milyar, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 176,092 milyar, sektor keuangan sebesar Rp. 42,804 milyar, sektor industri pengolahan sebesar Rp. 30,411 milyar, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 25,231 milyar, sektor bangunan sebesar Rp. 6,686 milyar, sektor listrik, gas, & air bersih sebesar Rp. 2,997 milyar, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 1,102 milyar.

Sementara itu nilai nilai PDRB sektoral atas dasar harga konstan 2000 yang paling tinggi adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 762,173 milyar, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar Rp. 205,817 milyar, sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar Rp. 98,027 milyar, sektor keuangan sebesar Rp, 22,057 milyar, sector industri pengolahan sebesar Rp. 14,971 milyar, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 12,341 milyar, sektor bangunan sebesar Rp. 4,241 milyar, sektor listrik, gas, & air bersih sebesar Rp. 1,605 milyar, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 0,386 milyar. seperti disajikan dalam tabel 3.10.

**Tabel 3.10 :**  
Nilai PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2011  
(jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku <sup>**)</sup>	Atas Dasar Harga Konstan 2000 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1 097 538	762 173
2. Pertambangan dan Penggalian	1 102	386
3. Industri Pengolahan	30 411	14 971
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	2 997	1 605
5. Bangunan	6 686	4 241
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	176 092	98 027
7. Pengangkutan dan Komunikasi	25 231	12 341
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan	42 804	22 057
9. Jasa - jasa	452 536	205 817
<b>PDRB</b>	<b>1 835 397</b>	<b>1 121 617</b>

Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara

### 3.4.2 Struktur Perekonomian Makro

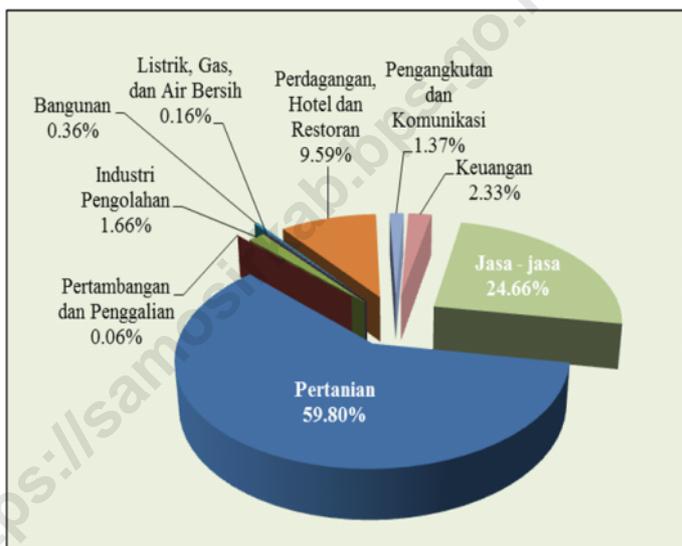
Struktur perekonomian makro suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari daerah tersebut. Hingga tahun 2011 struktur perekonomian makro Kabupaten Samosir masih tetap bertumpu pada sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2011, yaitu mencapai 59,80 persen.

Peranan sektor yang lain masing-masing adalah sektor jasa pemerintahan, swasta, dan perorangan sebesar 24,66 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,59 persen, sektor keuangan 2,33 persen, sektor industri pengolahan 1,66 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 1,37 persen, sektor bangunan 0,36 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih 0,16 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian 0,06 persen.

Berdasarkan peranan masing-masing sektor tersebut, dapat dikatakan bahwa perekonomian makro Kabupaten Samosir sebenarnya sangat ditentukan oleh tiga sektor yang dominan, yaitu sektor pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor jasa pemerintahan, swasta, dan perorangan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, dengan total peranan ketiga sektor tersebut mencapai 94,05 persen, sementara total peranan dari keenam

sektor-sektor yang lain hanya memberikan peranan sebesar 5,95 persen.

**Gambar 3.5 :**  
Struktur Perekonomian Makro Kabupaten Samosir  
Tahun 2011



Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

Suatu daerah yang memiliki struktur perekonomian makro dengan peranan sektor pertanian yang cukup besar dan dominan, akan berkembang ke arah yang semakin maju apabila daerah tersebut mampu meningkatkan peranan sektor-sektor non pertanian dari waktu ke waktu, oleh sebab itu daerah ini masih memerlukan upaya-upaya yang lebih besar untuk meningkatkan

kinerja perekonomian beberapa sektor non pertanian yang lain guna akselerasi kemajuan perekonomian makro daerah Kabupaten Samosir.

### 3.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir setiap tahun mengalami peningkatan, hingga mencapai 5,96 persen pada tahun 2011.

**Gambar 3.6 :**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir  
Tahun 2007 – 2011, (persen)



Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

\*\*\*) Angka Sangat Sementara, \*) Angka Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kemajuan perekonomian makro suatu wilayah yang menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan sebagai akibat adanya aktifitas pembangunan di berbagai sektor di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi adalah merupakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2000.

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa hingga tahun 2011 seluruh sektor ekonomi di Kabupaen Samosir mengalami pertumbuhan positif yang bervariasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2011 adalah sektor bangunan, yaitu mencapai 10,77 persen, diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 9,92 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,06 persen, sektor keuangan, asuransi, sektor usaha persewaan sebesar 7,90 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,50 persen, sektor jasa-jasa sebesar 6,44 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,35 persen, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,71 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 4,18 persen.

Diketahui juga bahwa sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan wilayah

yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga saat ini melalui pembangunan infrastruktur, serta semakin meningkatnya pembangunan oleh masyarakat, baik pembangunan rumah tempat tinggal maupun sarana lainnya.

**Tabel 3.11 :**  
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB  
Kabupaten Samosir Menurut Sektor, (persen)

N0.	Sektor	2007	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	4,81	5,16	5,17	5,58	5,71
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,33	4,90	5,21	6,27	8,06
3.	Industri Pengolahan	1,74	2,12	2,50	3,25	4,18
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,09	6,86	8,26	9,49	9,92
5.	Bangunan	9,32	9,78	9,88	10,25	10,77
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,38	5,08	5,20	5,40	6,50
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,72	4,59	5,00	5,85	6,35
8.	Keluangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan	2,93	4,27	4,96	5,48	7,90
9.	Jasa - jasa	4,26	4,58	4,87	5,76	6,44
	<b>PDRB</b>	<b>4,59</b>	<b>5,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,59</b>	<b>5,96</b>

Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara, <sup>\*)</sup> Angka Sementara

### 3.5 Kondisi Umum Kesejahteraan Rakyat

#### 3.5.1 PDRB Per Kapita

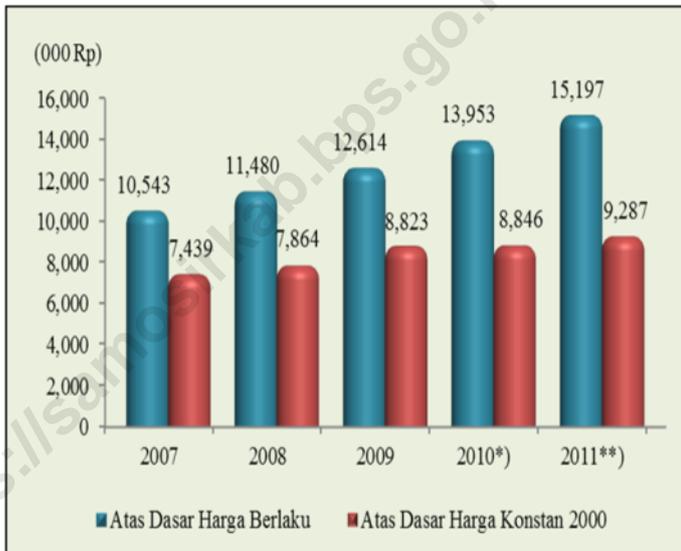
Seiring dengan kondisi perekonomian makro Kabupaten Samosir yang relatif semakin membaik akibat adanya laju pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Samosir yang diukur dengan menggunakan PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan 2000 juga semakin meningkat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Samosir selama tahun 2007-2011 setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp. 10,54 juta per tahun pada tahun 2007 menjadi Rp. 15,20 juta per tahun pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 9,57 persen per tahun. Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 yang merupakan pendapatan per kapita riil dimana pengaruh kenaikan harga (inflasi) telah diabaikan, juga mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp. 7,44 juta pada tahun 2007 menjadi Rp. 9,29 juta pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,70 persen per tahun.

Perlu dijelaskan bahwa angka PDRB per kapita suatu wilayah, sesungguhnya bukanlah merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing setiap penduduk, namun angka ini

merupakan ukuran rata-rata yang digunakan untuk mengetahui gambaran rata-rata tingkat pendapatan per kapita secara regional.

**Gambar 3.7 :**  
Perkembangan PDRB Per Kapita Penduduk  
Kabupaten Samosir Tahun 2007 – 2011



Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

\*\*\*) Angka Sangat Sementara, \*) Angka Sementara

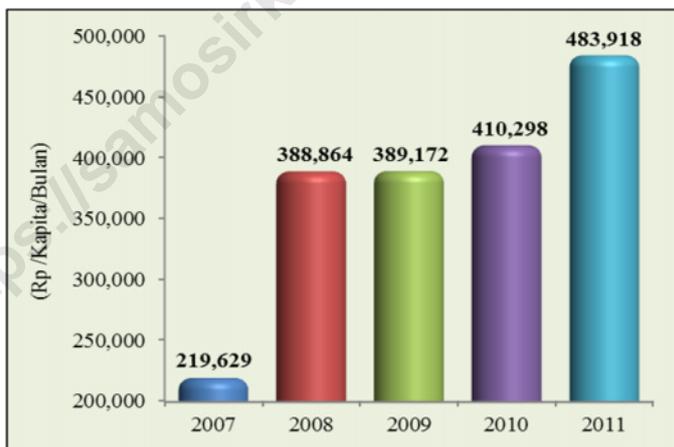
Untuk mengetahui apakah peningkatan pendapatan ini telah dinikmati secara merata oleh penduduk Kabupaten Samosir, dapat diketahui dari distribusi pendapatan penduduk sebagaimana akan dibahas dalam bab selanjutnya.

### 3.5.2 Pengeluaran Per Kapita dan Pola Konsumsi

Selain ukuran PDRB per kapita, gambaran peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dapat juga dilihat melalui pendekatan rata-rata nilai pengeluaran per kapita maupun struktur pengeluaran konsumsi per kapita yang digunakan, baik untuk konsumsi makanan maupun untuk konsumsi bukan makanan (pola konsumsi).

**Gambar 3.8 :**

Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2007- 2011



Sumber : Susenas, 2007-2011

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita

penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi makanan dan bukan makanan selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 219.629,- per bulan pada tahun 2007 menjadi Rp. 483.918,- per bulan pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 21,83 persen per tahun.

**Tabel 3.12 :**  
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan  
Untuk Makanan Dan Bukan Makanan,  
Tahun 2007 – 2011

Tahun	Makanan		Bukan Makana		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	148 180	67,47	71 448	32,53	219 628	100,00
2008	259 312	66,68	129 552	33,32	388 864	100,00
2009	282 764	72,66	106 408	27,34	389 172	100,00
2010	272 679	66,46	137 619	33,54	410 298	100,00
2011	323 995	66,95	159 923	33,05	483 918	100,00

Sumber : Susenas, 2007-2011

Hingga tahun 2011 proporsi rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi makanan masih lebih besar dari pada bukan makanan, yaitu proporsi untuk konsumsi makanan adalah sebesar 66,95 persen dengan nilai

## KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Rp. 323.995 dan untuk bukan makanan adalah 33,05 persen dengan nilai Rp. 159.923. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Kabupaten Samosir masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok makanan,

**Gambar 3.9 :**  
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan  
Untuk Makanan Dan Bukan Makanan  
Tahun 2007 – 2011



Sumber : Susenas 2007 - 2011

Perubahan pola pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan setiap tahun dapat menunjukkan perubahan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk. Pada umumnya, proporsi rata-rata pengeluaran per kapita untuk bukan makanan

termasuk aneka barang dan jasa, seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, dan sejenisnya, yang relatif lebih besar dari pada proporsi rata-rata pengeluaran untuk makanan dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik, sebaliknya proporsi rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan yang relatif lebih besar dari pada proporsi rata-rata pengeluaran untuk bukan makanan dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk yang relatif belum baik.

Sementara itu, persentase penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan dapat dilihat pada tabel 3.13.

Bila dibandingkan dengan tahun 2010, persentase penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2011 yang memiliki golongan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp. 80.000 sampai dengan Rp. 99.999, antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 149.999, antara Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 199.999, dan antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999, adalah berkurang, sedangkan persentase penduduk yang memiliki golongan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 399.999, antara Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 499.999, dan lebih dari Rp. 500.000,- adalah semakin meningkat.

## KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Pada tahun 2011, penduduk Kabupaten Samosir yang paling banyak menurut golongan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999, yaitu mencapai sebanyak 34,36 persen, sedangkan yang paling kecil adalah antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 149.999, yaitu sebanyak 0,79 persen.

**Tabel 3.13 :**

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir  
Menurut Golongan Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah)	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 - 99.999	0,00	0,00	0,19	0,00
100.000 - 149.999	10,52	0,63	2,93	0,79
150.000 - 199.999	8,10	7,83	12,51	5,59
200.000 - 299.999	23,64	33,81	42,16	34,36
300.000 - 399.999	36,04	23,14	16,69	22,87
400.000 - 499.999	8,85	14,07	11,38	14,78
Lebih dari 500.000	12,85	20,52	14,14	21,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2008-2011

### 3.5.3 Tingkat Kemiskinan

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar 13,87 persen per tahun, yaitu dari 39,97 ribu orang (30,59 persen) pada tahun 2006 dengan batas garis kemiskinan Rp. 200.092,- per kapita pe bulan menjadi 18,95 ribu orang (15,67 persen) pada tahun 2011 dengan dengan batas garis kemiskinan Rp. 220.103,- per kapita pe bulan.

**Tabel 3.14 :**  
Perkembangan Indikator Kemiskinan  
di Kabupaten Samosir

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	153 888	36,10	27,76	4,29	1,13
2008	156 352	24,44	18,76	2,72	0,54
2009	181 619	22,85	17,31	4,24	1,06
2010	201 595	19,70	16,51	2,69	0,67
2011	220 103	18,95	15,67	2,55	0,64

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional secara relatif hingga tahun 2011, dan adanya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita akibat pencapaian laju pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Samosir yang positif hingga tahun 2011.

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa, sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, garis kemiskinan di Kabupaten Samosir setiap tahun meningkat, namun jumlah dan persentase penduduk miskin justru menurun. Hal ini disebabkan karena harga-harga kebutuhan dasar di Kabupaten Samosir sejak tahun 2007 hingga 2011 semakin meningkat, namun tingkat kenaikan pendapatan penduduk setiap tahun adalah lebih tinggi daripada kenaikan harga-harga tersebut.

Disamping itu berbagai program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan khususnya dalam upaya mengurangi beban hidup penduduk miskin, seperti Program Beras Raskin (Raskin), Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai program yang lain, juga telah memberikan dampak positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Samosir hingga tahun 2011.

Tabel 3.14 juga memperlihatkan beberapa indikator lain tentang kemiskinan di Kabupaten Samosir yang relatif semakin membaik hingga tahun 2011, diantaranya adalah rata-rata kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ). Angka Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Samosir sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 cenderung semakin kecil hingga menjadi 2,55. demikian juga dengan Intensitas Kemiskinan yang ditunjukkan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), yaitu ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin sebesar 0,64 pada tahun 2011 juga relatif semakin kecil, walaupun masih dibawah  $P_2$  pada tahun 2008.



## **BAB 4**

---

# **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR**

## **BAB IV**

### **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR**

#### **4.1 Analisis Ukuran Gini Ratio**

Berdasarkan perhitungan koefisien Gini (*Gini Ratio*) terhadap distribusi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 menurut golongan pengeluaran sebagai pendekatan (*proxy*) rata-rata pendapatan per kapita per bulan, diperoleh koefisien Gini Kabupaten Samosir tahun 2011 adalah sebesar 0,252, seperti dalam tabel 4.1.

Menurut Hera Susanti dkk, dalam buku Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI,1995, hal ini mempunyai arti bahwa ketimpangan pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah rendah (di bawah angka 0.4), atau menurut Michael P. Todaro - Buhanuddin Abdullah, dalam buku Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, edisi ketiga jilid 1, Erlangga, 1993 adalah relatif merata (terletak diantara 0,20 dan 0,35), walupun nilainya berfluktuasi.

**Tabel 4.1 :**  
Gini Ratio Kabupaten Samosir  
Tahun 2007-2011

Tahun	Gini Ratio	Kriteria Ketimpangan
(1)	(2)	(3)
2007	0,233	Rendah/Relatif Merata
2008	0,259	Rendah/Relatif Merata
2009	0,229	Rendah/Relatif Merata
2010	0,273	Rendah/Relatif Merata
2011	0,252	Rendah/Relatif Merata

Sumber : BPS - Kabupaten Samosir

Bahkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa Gini ratio Kabupaten Samosir sejak tahun 2007 hingga 2011 adalah dibawah 0,4 atau terletak diantara 0,20 dan 0,35 yang mempunyai arti bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2007 hingga 2011 adalah rendah atau relatif merata, atau dengan pengertian lain bahwa sejak tahun 2007 hingga 2011 pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Samosir menurut berbagai kelompok pendapatan adalah relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam,

Perlu diingat bahwa ukuran ini adalah bersifat relatif dan hanya berlaku dalam distribusi pendapatan/pengeluaran antar

golongan penduduk di Kabupaten Samosir, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan ukuran tingkat kesejahteraan yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan wilayah/daerah lain yang memiliki PDRB per Kapita per tahun atas dasar berlaku dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari Kabupaten Samosir, walaupun angka Gini Ratio adalah sama. Artinya walaupun PDRB per Kapita atas dasar berlaku Kabupaten Samosir mencapai Rp. 15,197 juta per tahun dengan rata-rata pengeluaran penduduk pada tahun 2011 mencapai Rp. 410.298 per kapita per bulan, namun tingkat kesejahteraan penduduknya belum tentu sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah lain, sekalipun daerah tersebut memiliki angka Gini Ratio yang sama dengan Kabupaten Samosir.

#### **4.2. Analisis Ukuran Bank Dunia**

Berdasarkan data persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan dan persentase pengeluaran per kapita per bulan penduduk menurut golongan pengeluaran, dapat diketahui besarnya proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok desil penduduk menurut kelompok penerima pendapatan 20 % berpendapatan Terendah (Termiskin), 20 % berpendapatan Rendah (Miskin), 20 % berpendapatan Sedang,

## DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR

20 % berpendapatan Tinggi (Kaya), dan 20 % berpendapatan tertinggi (Terkaya).

**Tabel 4.2 :**  
Persentase Pendapatan yang Diterima  
oleh Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan  
Tahun 2007 - 2011

Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan	Persentase Pendapatan yang Diterima (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(20 %) Termiskin	13.81	14,20	12,51	12,23	11,37
(20 %) Miskin	32.52	25,62	29,68	30,09	24,08
(20 %) Sedang	25.56	22,57	20,70	20,89	25,75
(20 %) Kaya	16.38	21,06	20,33	20,89	23,57
(20 %) Terkaya	11.73	16,55	16,79	15,89	15,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2007 – 2011 (diolah)

Menurut Kuznet's distribusi pendapatan yang benar-benar merata adalah apabila kelompok rumah tangga atau penduduk dalam setiap desil proporsi pendapatannya harus sama dengan 1/10 (10 persen), artinya bahwa proporsi rumah tangga atau

penduduk yang menerima pendapatan 10 persen berpendapatan paling bawah adalah kira-kira sama dengan 10 persen dari jumlah penduduk, yang menerima pendapatan 20 persen berpendapatan paling bawah adalah kira-kira sama dengan 20 persen dari jumlah penduduk, yang menerima pendapatan 30 persen berpendapatan paling bawah adalah kira-kira sama dengan 30 persen dari jumlah penduduk, yang menerima pendapatan 40 persen berpendapatan paling bawah adalah kira-kira sama dengan 40 persen dari jumlah penduduk, dan seterusnya

Sehubungan dengan Kuznet's tersebut, tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kelompok penduduk di Kabupaten Samosir yang menikmati pendapatan yang kurang adil secara ekonomi adalah kelompok 20 % berpendapatan Terendah (Termiskin), bahkan lebih buruk sejak tahun 2007, yaitu pada tahun 2011 hanya menikmati pendapatan sebesar 11,37 persen dari 20 persen yang ideal, sementara yang dinikmati oleh 20 % penduduk berpendapatan Rendah (Miskin) adalah sebesar sebesar 24,08 persen dari 20 persen yang ideal, yang dinikmati oleh 20 % penduduk berpendapatan Sedang adalah sebesar 25,75 persen dari 20 persen yang ideal, yang dinikmati oleh 20 % penduduk berpendapatan Tinggi (Kaya) adalah sebesar 23,57 persen dari 20 persen yang ideal, dan yang dinikmati oleh 20 % penduduk berpendapatan Tertinggi (Terkaya) adalah sebesar 15,23 persen dari 20 persen yang ideal.

Oleh sebab itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menciptakan distribusi pendapatan penduduk yang ideal di Kabupaten Samosir adalah dengan menciptakan strategi dan kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan khususnya bagi 20 % kelompok berpendapatan Terendah (Termiskin) ini.

Biasanya penyebab ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan adalah akibat ketidakmertaan dalam kepemilikan kekayaan, ketidakmertaan dalam upah tenaga kerja (*Labour Income*) yang biasanya akibat rendahnya kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, terbatasnya bidang pekerjaan, dan factor-faktor lainnya, seperti lingkungan, gizi buruk, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

Dengan menggunakan ukuran Bank Dunia, dimana kelompok penduduk penerima pendapatan dibagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok penduduk 40 % berpendapatan Rendah (Miskin), kelompok penduduk 40 % berpendapatan Menengah, dan kelompok penduduk 20 % berpendapatan Tinggi (Terkaya), diketahui bahwa pada tahun 2011 persentase jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin) terhadap total pendapatan seluruh penduduk di Kabupaten Samosir adalah sebesar 35,45 persen, oleh 40 % kelompok berpendapatan Menengah adalah 49,32 persen, dan

## DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR

oleh kelompok 20 % berpendapatan Tinggi (Terkaya) adalah 15,23 persen, seperti ditunjukkan pada pada tabel 4.3.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kategori ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 ini, bahkan sejak tahun 2007, adalah rendah, karena sejak tahun 2007 hingga 2011 proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah (Miskin) terhadap total pendapatan seluruh penduduk adalah lebih besar dari 17 persen.

**Tabel 4.3 :**

Perkembangan Persentase Pendapatan yang Diterima oleh Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan

Tahun	Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan		
	40 % Rendah	40 % Menengah	20 % Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	46,33	41,94	11,73
2008	39,82	43,63	16,55
2009	42,19	41,03	16,78
2010	42,33	41,78	15,89
2011	35,45	49,32	15,23

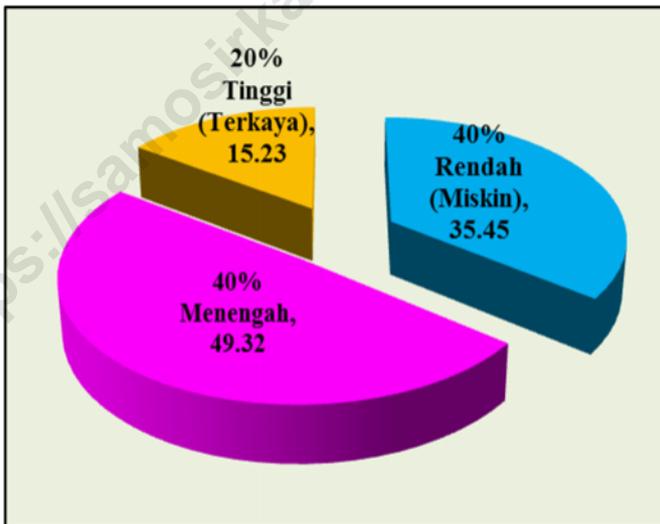
Sumber : Susenas 2007 – 2011 (diolah)

## **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR**

Namun demikian, berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok berpendapatan Menengah adalah meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010, bahkan merupakan persentase yang tertinggi selama tahun 2007 hingga 2011.

**Gambar 4.1. :**

Persentase Pendapatan Yang Diterima Menurut Kelompok Penduduk Di Kabupaten Samosir Tahun 2011



Sumber : Susenas 2011, diolah

Meningkatnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 % kelompok berpendapatan Menengah pada tahun 2011 ini

mengakibatkan berkurangnya persentase pendapatan yang dinikmati, baik oleh penerima pendapatan kelompok 20 % berpendapatan Tinggi (Terkaya), maupun oleh penerima pendapatan kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin), bahkan pengurangan persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin) ini cukup besar sehingga persentasenya adalah merupakan yang terendah selama tahun 2007 hingga 2011.

Sejalan dengan Kuznet's, kondisi ini perlu diantisipasi melalui strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Samosir ke depan agar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin), khususnya kelompok 20 % berpendapatan Terendah (Termiskin) tidak semakin berkurang setiap tahun, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan akibat distribusi pendapatan penduduk yang semakin tidak merata.

Untuk melihat tingkat ketidakmerataan antara dua kelompok secara ekstrim, yaitu kelompok yang sangat miskin dengan kelompok yang sangat kaya dapat dilihat dari nisbah (rasio) antara pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok Rendah dengan 20 % kelompok Tinggi.

Tabel 4.4 meunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio antara pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok yang sangat

## **DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR**

miskin dengan 20 % kelompok yang sangat kaya adalah 1 berbanding 0,43, yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk yang berasal dari 40 % kelompok yang sangat miskin terdapat 43 orang penduduk yang berasal dari 20 % kelompok yang sangat kaya, sementara pada tahun 2010 setiap 100 orang penduduk yang berasal dari 40 % kelompok sangat miskin terdapat 38 orang penduduk yang berasal dari 20 % kelompok yang sangat kaya. Berdasarkan tabel 4.4 dapat juga dilihat bahwa nisbah (rasio) pada tahun 2011 adalah yang lebih buruk selama tahun 2007 hingga 2011.

**Tabel 4.4 :**

Perkembangan Nisbah Pendapatan yang Diterima  
Antara Kelompok Miskin dan Kaya di Kabupaten Samosir

Tahun	Nisbah Pendapatan yang Diterima oleh 40 % Rendah dengan 20 % Tinggi
(1)	(2)
2007	1 : 0,25
2008	1 : 0,42
2009	1 : 0,40
2010	1 : 0,38
2011	1 : 0,43

Sumber : Tabel 4.3

## **BAB 5**

---

### **PENUTUP**

## BAB VI

# P E N U T U P

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Gini Rasio, tingkat ketimpangan pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 adalah **rendah** atau **relatif merata**, dengan Gini Ratio sebesar 0,252.
2. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada tahun 2011 persentase pendapatan yang dinikmati oleh penduduk Kabupaten Samosir dari kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin) adalah sebesar 35,45 persen, oleh 40 % berpendapatan Menengah adalah sebesar 49,32 persen, dan oleh 20 % berpendapatan Tinggi (Kaya) adalah sebesar 15,23 persen, sehingga kategori ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2011 adalah **rendah**,

3. Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berasal dari kelompok 40 % berpendapatan Menengah cenderung semakin besar dan merupakan proporsi yang tertinggi selama tahun 2007-2011, yaitu mencapai 49,32 persen dari seluruh pendapatan penduduk. Meningkatnya proporsi pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berasal dari kelompok 40 % berpendapatan Menengah ini mengakibatkan semakin berkurangnya proporsi pendapatan yang dinikmati oleh penduduk dari kelompok 20 % berpendapatan Tinggi (Kaya), dan kelompok 40 % berpendapatan Rendah (Miskin), yaitu hanya sebesar 35,45 persen, bahkan merupakan proporsi yang paling kecil selama tahun 2007 hingga 2011 yang disebabkan terutama karena semakin berkurangnya pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 20 % penduduk berpendapatan Sangat Rendah (Termiskin), yaitu hanya sebesar 11,37 persen.
4. Selama kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir setiap tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Samosir yang diukur dengan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2007-2011 juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 10,54 juta per tahun pada tahun 2007 menjadi Rp. 15,20 juta per tahun pada tahun 2011, atau

dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 9,57 persen per tahun.. Namun berdasarkan Teori Kuznet's pertumbuhan ini tidak banyak dinikmati oleh kelompok 20 % berpendapatan Sangat Rendah (Termiskin), bahkan tahun 2011 semakin berkurang hingga 11,37 persen dari 20 persen yang ideal. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat yang adil secara ekonomi sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir hendaknya lebih banyak mengarahkan strategi dan program pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh kelompok 20 % berpendapatan Sangat Rendah (Termiskin) ini.

5. Berbagai program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan hingga tahun 2011, seperti Program Beras Raskin (Raskin), Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang lain, menunjukkan dampak yang sangat positif untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin di Kabupaten Samosir, oleh sebab itu program-program tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga pada

akhirnya diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan.

6. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari Rp. 219.628 sebulan pada tahun 2007 menjadi Rp. 483.918 sebulan pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 21,83 persen per tahun. Namun peningkatan ini belum mencerminkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk secara signifikan dilihat dari pola konsumsi masyarakat secara umum, dimana hingga tahun 2011 rata-rata pengeluaran per kapita ini sebahagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, yaitu mencapai 66,95 persen, sementara untuk kebutuhan non makanan hanya sebesar 33,05 persen. Pada umumnya ciri rumah tangga di negara/wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang cenderung semakin tinggi, ditandai dengan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan yang cenderung semakin kecil dan untuk bukan makanan yang semakin besar.

<https://samosirkab.bps.go.id>

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 :**  
**Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Samsir**  
**Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sianjur Mulamula	140,24	9 224	65,77
2.	Harian	560,45	7 933	14,16
3.	Sitiotio	50,76	7 191	141,67
4.	Onanrunggu	60,89	10 425	171,23
5.	Nainggolan	87,86	11 960	136,13
6.	Palipi	129,55	16 237	125,33
7.	Ronggurnihuta	94,87	8 434	88,9
8.	Pangururan	121,43	29 687	244,48
9.	Simanindo	198,20	19 681	99,29
Kabupaten Samsir		1 444,25	120 772	83,62

Sumber : Samsir Dalam Angka 2012

**Lampiran 2 ;**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Samsir dan Propinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2004 – 2011**

Tahun	Samsir (000 jiwa)	%	Sumatera Utara (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004	26,20	21,89	1 800,10	14,93
2005	30,90	23,13	1 840,20	14,68
2006	39,97	30,59	1 979,70	15,66
2007	36,10	27,76	1 768,5	13,90
2008	24,44	18,76	1 611,51	12,47
2009	22,85	17,31	1 474,23	11,27
2010	19,70	16,51	1 490,90	11,31
2011	18,95	15,67	1 481,31	11,33

Sumber : Samsir Dalam Angka 2012

**Lampiran 3 :**

Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan  
Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Jenis Konsumsi  
Tahun 2006 – 2011, (rupiah)

Tahun	Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan			Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	159 767	72 118	231 885	68,90	31,10	100,00
2007	148 180	71 448	219 629	67,47	32,53	100,00
2008	259 312	129 552	388 864	66,68	33,32	100,00
2009	282 764	106 408	389 172	72,66	27,34	100,00
2010	272 679	137 619	410 298	66,46	33,54	100,00
2011	323 995	159 923	483 918	66,95	33,05	100,00

Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

**Lampiran 4 :**  
**Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2011**  
**(persen)**

KABUPATEN/KOTA	GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN								JUMLAH
	Kurang dari 80.000	80.000 99.999	100.000 149.999	150.000 199.999	200.000 299.999	300.000 399.999	400.000 499.999	Lebih dari 500.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. NIAS		1,06	11,40	33,58	33,70	14,39	3,06	3,30	100,00
02. MANDAILING NATAL			0,47	0,70	20,83	19,79	22,31	35,91	100,00
03. TAPANULI SELATAN			0,24	1,10	18,22	26,26	23,74	30,44	100,00
04. TAPANULI TENGAH		0,40	2,51	9,01	30,20	21,67	11,24	24,97	100,00
05. TAPANULI UTARA			0,30	2,64	30,50	23,31	12,13	31,13	100,00
06. TOBA SAMOSIR				1,36	11,60	18,72	15,37	52,96	100,00
07. LABUHAN BATU				3,10	17,08	18,93	14,88	46,01	100,00
08. ASAHAN			0,15	3,79	19,72	20,44	16,35	39,55	100,00
09. SIMALUNGUN			0,03	1,40	18,04	21,72	19,09	39,73	100,00
10. DAIRI				0,62	19,81	25,03	14,89	39,56	100,00
11. KARO				0,57	9,25	12,60	15,77	61,82	100,00
12. DELI SERDANG		0,28		0,47	13,67	24,04	22,03	39,62	100,00
13. LANGKAT			0,28	4,61	20,00	23,40	16,24	35,48	100,00
14. NIAS SELATAN			4,73	26,01	47,41	17,99	7,88	5,98	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN				3,94	26,78	24,51	15,65	29,12	100,00
16. PAKPAK BHAKAT			0,94	7,10	49,34	24,80	9,99	12,67	100,00
17. SAMOSIR			0,79	5,59	34,36	22,87	14,78	21,61	100,00
18. SERDANG BEDAGAI			0,07	1,10	10,09	21,29	18,24	46,21	100,00
19. BATU BARA			0,42	1,34	22,57	27,96	16,04	31,37	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA			0,48	0,87	20,74	22,06	21,49	34,87	100,00
21. PADANG LAWAS			0,73	1,06	23,61	27,88	17,11	29,61	100,00
22. LABUHAN BATU SELATAN	0,49			0,34	7,18	18,62	24,89	48,49	100,00
23. LABULAN BATU UTARA				1,09	10,73	17,35	19,89	50,93	100,00
24. NIAS UTARA			4,30	14,37	42,97	17,68	9,36	11,32	100,00
25. NIAS BARAT			4,37	16,06	42,57	20,27	7,67	9,07	100,00
71. SIBOLGA			0,56	1,37	17,67	20,37	13,47	46,26	100,00
72. TANJUNG BALAI				4,41	25,14	23,50	14,56	32,38	100,00
73. PEMATANG SIANTAR				2,33	14,46	18,11	15,87	49,24	100,00
74. TEBING TINGGI			1,36	1,03	19,01	20,95	15,89	41,77	100,00
75. MEDAN			0,26	2,10	7,26	12,18	17,90	60,31	100,00
76. BINJAI			0,16	1,79	13,39	15,73	21,02	47,86	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN			0,56	1,26	13,94	15,85	14,07	34,32	100,00
78. GUNUNG SITOLI			5,97	13,60	25,70	14,11	10,74	29,37	100,00
SUMATERA UTARA	0,01	0,05	0,58	3,21	17,15	19,95	17,47	41,54	100,00
- Perkotaan			0,23	1,71	12,05	18,18	18,20	49,63	100,00
- Perdesaan	0,02	0,10	0,92	4,72	22,09	21,67	16,76	33,71	100,00

Sumber : Susenas, 2011, BPS

**Lampiran 5 :**  
**Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2011**  
**(persen)**

KABUPATEN/KOTA	GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN								Tingkat dari 500.000	PMT.AH
	Kurang dari 80.000	80.000- 99.999	100.000- 149.999	150.000- 199.999	200.000- 299.999	300.000- 399.999	400.000- 499.999			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01. NIAS		0,43	6,19	24,44	32,61	20,78	5,97	10,13	100,00	
02. MANDAILING NATAL			0,17	0,24	10,17	13,41	19,44	56,67	100,00	
03. TAPANULI SELATAN			0,07	0,42	9,71	19,08	21,94	48,78	100,00	
04. TAPANULI TENGAH		0,08	0,68	3,54	16,39	16,62	11,10	51,59	100,00	
05. TAPANULI UTARA			0,08	0,95	15,41	18,18	10,74	56,63	100,00	
06. TOBA SAMOSIR				0,36	4,85	10,27	10,75	73,77	100,00	
07. LABUHAN BATU				0,98	8,03	11,90	17,05	67,04	100,00	
08. ASAHAN			0,04	1,32	9,63	13,37	13,68	61,96	100,00	
09. SIMALUNGUN			0,01	0,47	8,89	14,07	15,55	61,03	100,00	
10. DAIRI				0,23	10,04	17,12	13,11	59,50	100,00	
11. KARO				0,15	3,48	6,42	10,50	79,45	100,00	
12. DELI SERDANG		0,04		0,14	6,76	13,72	18,48	58,56	100,00	
13. LANGKAT			0,07	1,65	10,45	16,11	14,79	57,43	100,00	
14. NIAS SELATAN			2,37	26,62	26,91	16,02	12,63	15,44	100,00	
15. HUMBANG HIASU NDUTAN				1,60	15,34	18,88	15,50	48,69	100,00	
16. PAKPAK BHARAT			0,23	3,63	31,32	23,79	12,01	29,04	100,00	
17. SAMOSIR			0,26	2,41	21,67	19,37	15,98	40,31	100,00	
18. SERDANG BEDAGAI			0,07	0,38	4,79	15,48	14,87	64,71	100,00	
19. BATUBARA			0,12	0,53	12,17	20,14	14,98	52,06	100,00	
20. PADANG LAWAS UTARA			0,13	0,32	11,14	16,30	20,12	51,89	100,00	
21. PADANG LAWAS			0,20	0,43	13,16	20,67	16,16	49,37	100,00	
22. LABUHAN BATU SELATAN	0,07			0,11	3,49	12,09	20,55	63,69	100,00	
23. LABUHAN BATU UTARA				0,35	4,95	10,95	15,80	67,95	100,00	
24. NIAS UTARA			1,82	8,08	33,47	18,97	13,29	24,39	100,00	
25. NIAS BARAT			1,58	8,05	28,80	19,12	9,42	32,93	100,00	
71. SIBOLGA			0,14	0,41	7,79	17,01	10,33	69,37	100,00	
72. TANJUNG BALAI				1,62	12,80	15,90	12,69	56,90	100,00	
73. PIMATANG SIANTAR				0,64	6,28	10,33	11,79	70,96	100,00	
74. TEBING TINGGI			0,35	0,33	8,97	13,06	17,96	64,37	100,00	
75. MEDAN			0,05	0,55	2,69	5,99	11,19	79,53	100,00	
76. BINJAI			0,04	0,51	5,57	8,48	14,37	71,08	100,00	
77. PADANGSIDEMPAN			0,17	0,35	5,61	8,40	9,67	75,90	100,00	
78. GUNUNG SIBOLI			1,57	6,17	14,89	11,37	10,71	54,59	100,00	
SUMATERA UTARA	0,00	0,01	0,14	1,06	8,04	17,64	14,16	63,94	100,00	
-Pakotian			0,05	0,50	5,08	10,12	12,97	71,28	100,00	
-Perdesaan	0,00	0,02	0,26	1,78	11,82	15,85	15,68	54,59	100,00	

Sumber : Susenas, 2011, BPS

## Lampiran 6 :

Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Konsumsi Tahun 2011, (Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	PENGLUARAN/KAPITA/BULAN			% PENGLUARAN/KAPITA/BULAN		
	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. NIAS	184.693	80.836	265.529	69,56	30,44	100,00
02. MANDAILING NATAL	356.868	209.667	566.536	62,99	37,01	100,00
03. TAPANULI SELATAN	331.376	205.733	537.111	61,70	38,30	100,00
04. TAPANULI TENGAH	302.735	186.151	488.889	61,92	38,08	100,00
05. TAPANULI UTARA	334.735	230.325	565.061	59,24	40,76	100,00
06. TOBA SAMOSIR	476.745	317.649	794.394	57,30	42,70	100,00
07. LAHULIAN BATU	351.857	254.859	606.716	57,99	42,01	100,00
08. ASAHAN	318.949	245.257	564.205	56,53	43,47	100,00
09. SIMALUNGUN	341.491	249.190	590.681	57,81	42,19	100,00
10. DAIRI	385.618	197.161	582.779	66,17	33,83	100,00
11. KARO	462.710	284.412	747.122	61,93	38,07	100,00
12. DELI SERDANG	324.684	241.754	566.437	57,32	42,68	100,00
13. LANGKAT	312.173	221.400	533.572	58,51	41,49	100,00
14. NIAS SELATAN	226.509	93.527	320.036	70,78	29,22	100,00
15. HUMBANG HASINDUTAN	422.738	184.811	607.549	63,71	36,29	100,00
16. PAKPAK BHARAT	277.013	152.506	429.519	64,49	35,51	100,00
17. SAMOSIR	333.995	159.923	493.918	66,95	33,05	100,00
18. SERDANG BEDAGAT	317.666	250.228	567.894	58,15	41,85	100,00
19. BATUBARA	299.428	256.962	556.389	53,82	46,18	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA	352.851	169.768	522.620	67,52	32,48	100,00
21. PADANG LAWAS	317.389	181.556	498.944	63,65	36,35	100,00
22. LABUHAN BATU SELATAN	359.522	231.131	590.652	60,87	39,13	100,00
23. LABUHAN BATU UTARA	356.376	262.242	618.617	57,61	42,39	100,00
24. NIAS UTARA	243.984	111.056	355.040	68,72	31,28	100,00
25. NIAS BARAT	229.800	160.893	390.693	58,82	41,18	100,00
71. SIBOLGA	367.176	310.677	677.848	54,17	45,83	100,00
72. TANJUNGPALAI	308.852	262.261	571.113	54,03	45,97	100,00
73. PEMATANG SIANTAR	354.681	331.056	685.737	51,72	48,28	100,00
74. TEBING TINGGI	375.901	266.688	642.588	58,00	42,00	100,00
75. MEDAN	356.831	433.170	790.001	45,17	54,83	100,00
76. BINAI	353.409	331.866	685.275	51,57	48,43	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN	383.572	334.022	717.595	53,45	46,55	100,00
78. GUNUNG SIULI	274.153	210.128	484.281	56,61	43,39	100,00
SUMATERA UTARA	337.757	265.402	603.159	56,00	44,00	100,00
- Perkotaan	350.096	335.360	685.456	51,07	48,93	100,00
- Perdesaan	326.533	201.766	528.299	61,81	38,19	100,00

Sumber : Susenas, 2011, BPS

**Lampiran 7 :**

Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun Ke Atas  
Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu  
Agustus 2008 - 2011

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Angkatan Kerja	75 137	78 502	77 323	57 442
1. Bekerja	70 169	77 431	76 899	56 141
2. Pengangguran Terbuka	4 968	1 071	424	1 301
II. Bukan Angkatan	8 945	6 461	6 434	19 137
1. Sekolah	4 297	2 330	1 808	5 260
2. Mengurus Rumahtangga	2 157	1 697	1 731	9 442
3. Lainnya	2 491	2 434	2 895	4 435
Jumlah Angkatan Kerja+Bukan Angkatan Kerja	84 082	84 963	83 757	76 579

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 8 :**

Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	248	623	871
2. Tidak/belum tamat SD	3 574	4 908	8 482
3. SD	5 541	5 228	10 769
4. SLTP	8 273	6 048	14 321
5. SLTA	11 918	7 168	19 083
6. Diploma I/II/III/ Akademi/Universitas	2 106	1 810	3 916
Jumlah	31 660	25 782	57 442

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 9 :**

Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja  
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang  
Ditamatkan yan Jenis Kelamin, Agustus 2011

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	248	623	871
2. Tidak/belum tamat SD	3 574	4 908	8 482
3. SD	5 541	5 228	10 769
4. SLTP	8 273	6 000	14 273
5. SLTA	11 720	6 426	18 146
6. Diploma I/II/III/ Akademi/Universitas	1 790	1 810	3 600
Jumlah	31 146	24 995	56 141

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 10 :**

Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja  
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan  
Utama dan Jenis kelamin, Agustus 2011 (jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	23 362	18 279	41 641
2. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3. Industry Pengolahan	829	1 512	2 341
4. Listrik dan Air Minum	0	0	0
5. Konstruksi/	960	60	1 020
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1 305	2 701	4 006
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1 870	99	1 969
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Usaha Persewaan	169	0	169
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2 651	2 344	4 995
Jumlah	31 146	24 995	56 141

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 11 :**

Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk  
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi  
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Agustus 2010 (jiwa)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Di bawah SD	0	0	0
2. SD	0	0	0
3. SLTP I	0	48	48
4. SLTA	198	739	937
6. Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	316	0	316
Jumlah	514	787	1 301

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 12 :**

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara 2005 – 2011

Tahun	TPAK		TPT	
	Samosir	Sumatera Utara	Samosir	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	83,23	71,94	5,33	10,98
2006	75,48	66,90	4,63	11,51
2007	89,78	67,49	3,95	10,10
2008	89,36	68,33	6,61	9,10
2009	92,40	69,14	1,36	8,45
2010	92,32	69,51	0,55	7,43
2011	75,01	72,09	2,26	6,37

Sumber : SAKERNAS 2007 – 2011, BPS

**Lampiran 13 :**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samsir**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(jutaan rupiah)**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009 <sup>*)</sup>	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	796 226	853 506	921 411	1 008 228	1 097 538
2. Pertambangan & Pengalihan	731	793	866	955	1 102
3. Industri Pengolahan	17 265	18 939	21 752	25 706	30 411
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	1 909	2 096	2 324	2 630	2 997
5. Bangunan	3.591	4 137	4 776	5 559	6 686
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	129 335	138 152	147 854	160 780	176 092
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14 568	16 216	18 156	21 292	25 231
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan & Tanah, Jasa Perusahaan	28 163	30 925	34 082	37 991	42 804
9. Jasa - jasa	295 669	327 618	368 099	406 462	452 536
<b>PDRB</b>	<b>1 287 458</b>	<b>1 392 382</b>	<b>1 519 319</b>	<b>1 669 603</b>	<b>1 835 397</b>

Sumber : Samsir Dalam Angka, 2012

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

\*) Angka Sementara

**Lampiran 14 :**

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samsir  
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha  
(jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009 <sup>*)</sup>	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	617 422	649 293	682 885	721 006	762 173
2. Pertambangan & Penggalian	305	320	336	357	386
3. Industri Pengolahan	13 297	13 579	13 918	14 370	14 971
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	1 153	1 232	1 334	1 460	1 605
5. Bangunan	2 879	3 160	3 473	3 828	4 241
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	78 999	83 015	87 330	92 046	98 027
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9 984	10 442	10 964	11 604	12 341
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan & Tanah, Jasa Perusahaan	17 708	18 464	19 379	20 441	22 057
9. Jasa - jasa	166 711	174 347	182 841	193 370	205 817
<b>PDRB</b>	<b>908 458</b>	<b>953 851</b>	<b>1 002 459</b>	<b>1 058 485</b>	<b>1 121 617</b>

Sumber : Samsir Dalam Angka, 2012

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

\*) Angka Sementara

## Lampiran 15 :

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Lapangan Usaha  
(persen)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009 <sup>*)</sup>	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	4,81	5,16	5,17	5,58	5,71
2. Pertambangan & Penggalian	4,33	4,90	5,21	6,27	8,06
3. Industri Pengolahan	1,74	2,12	2,50	3,25	4,18
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	6,09	6,86	8,26	9,49	9,92
5. Bangunan	9,32	9,78	9,88	10,25	10,77
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,38	5,08	5,20	5,40	6,50
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,72	4,59	5,00	5,85	6,35
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan & Tanah, Jasa Perusahaan	2,93	4,27	4,96	5,48	7,90
9. Jasa - jasa	4,26	4,58	4,87	5,76	6,44
<b>PDRB</b>	<b>4,59</b>	<b>5,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,59</b>	<b>5,96</b>

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

\*) Angka Sementara

**Lampiran 16 :**

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita  
Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku  
dan Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (000 rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2000 (000 rupiah)	
	Samosir	Sumatera Utara	Samosir	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	9 733	12 685	7 066	7 383
2007	10 543	14 167	7 439	7 775
2008	11 480	16 403	7 864	8 141
2009	12 614	17 840	8 823	8 421
2010 <sup>*)</sup>	13 953	21 237	8 846	9 139
2011 <sup>**)</sup>	15 197	23 975	9 287	9 650

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

\*\*) Angka Sangat Sementara

\*) Angka Sementara

**Lampiran 17 :**

Worksheet Penghitungan Gini Ratio

Kabupaten : Samosir  
 Tahun : 2011  
 Daerah : Pedesaan + Perkotaan

Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)	% Penduduk (P)	% Pengeluaran	% Kumulatif Pengeluaran (Q)	Q <sub>i-1</sub>	(Q+Q <sub>i-1</sub> )	$\frac{P_i(Q+Q_{i-1})}{10.000}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100.000 – 149.999	0,79	0,26	0,26	0,00	0,26	0,205
150.000 – 199.999	5,59	2,41	2,67	0,26	2,93	16,379
200.000 – 299.999	34,36	21,67	24,34	2,67	27,01	928,064
300.000 – 399.999	22,87	19,37	43,71	24,34	68,05	1.556,304
400.000 – 499.999	14,78	15,98	59,69	43,71	103,40	1.528,252
> 500.000	21,61	40,31	100,00	59,69	159,69	3.450,901
<b>JUMLAH</b>	100,00	100,00				0,748

$$\text{Gini Ratio} = 1 - 0,748$$

$$= 0,252$$

## Lampiran 18 :

## Worksheet Penghitungan Gini Ratio

Kabupaten : Samosir  
 Tahun : 2010  
 Daerah : Pedesaan + Perkotaan

Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)	% Penduduk (P)	% Pengelu- aran	% Kumulatif Pengeluaran (Q)	Q <sub>-1</sub>	(Q+Q <sub>-1</sub> )	$\frac{P_i(Q_i+Q_{i-1})}{10.000}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 100.000	0,19	0,05	0,05	0,05	0,10	0,019
100.000 – 149.999	2,93	1,12	1,17	0,05	1,22	3,575
150.000 – 199.999	12,51	6,36	7,53	1,17	8,70	108,837
200.000 – 299.999	42,16	29,59	37,12	7,53	44,65	1.882,444
300.000 – 399.999	16,69	16,5	53,62	37,12	90,74	1.514,451
400.000 – 499.999	11,38	14,6	68,22	53,62	121,84	1.386,539
> 500.000	14,14	31,79	100,01	68,22	168,23	2.378,772
JUMLAH	100,00	100,00				0,727

$$\begin{aligned} \text{Gini Ratio} &= 1 - 0,727 \\ &= 0,273 \end{aligned}$$

<http://samosirkab.bps.go.id>

<https://samosirkab.bps.go.id>



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMOSIR**

Kompleks Perkantoran Pemkab Samosir Blok A  
Desa Siopat Sosor Parbaba - Pangururan 22392  
Telp./Fax : 0626-20104 e-mail : [bps1217@bps.go.id](mailto:bps1217@bps.go.id)  
website : <http://samosirkab.bps.go.id>